

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi di Indonesia khususnya daerah Aceh terwujud dari adanya partai politik lokal. partai politik lokal telah menjadi instrumen utama rakyat untuk berkompetensi sesuai dengan kendali institusi-institusi politik, yang dapat memberikan pengaruh yang kuat atas kebijakan-kebijakan publik. Selain itu, demokrasi juga mempunyai hubungan dengan perdamaian. Karena dalam lingkungan yang demokratis, masyarakat sipil berkembang dalam hubungan dengan komunitas yang berbeda-beda, konflik kekerasan dapat dicegah karena ketegangan dan konflik-konflik tersebut dapat diregulasikan dan diselesaikan melalui cara-cara yang menekankan pada perdamaian. Dalam sebuah pandangan bahwa konflik etnis dapat diselesaikan atau dicegah melalui kerangka kerja demokrasi, karena melalui demokrasi perbedaan-perbedaan akan terselesaikan secara damai. Keyakinan bahwa demokrasi dapat menyelesaikan konflik telah membimbing para cendekiawan dan para aktivis perdamaian untuk menyakini bahwa rekonstruksi pasca konflik membutuhkan demokrasi seperti halnya demokrasi membutuhkan perdamaian.

Hal ini terlihat pasca penyelesaian konflik di Aceh, dari pihak Indonesia, transisi demokrasi lah yang menjadi dasar untuk bernegosiasi dengan para pejuang separatis. Demokratisasi di Indonesia telah memperkuat posisi para pemimpin untuk berkomitmen dalam mencaapai solusi perdamaian di Aceh.

Saat duka mendalam karena musibah tsunami tentu saja membentuk suasana batin yang jauh berbeda dari proses negosiasi sebelumnya. Untuk mencapai partisipasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai kekuatan politik daerah, sejumlah tawaran, seperti kewenangan imigrasi, pencatuman kata “dan Aceh” dibelakang setiap kata Indonesia dalam undang-undang dasar. Lagu kebangsaan dan bendera sendiri dan sejumlah tuntutan lainnya direlakan untuk dikelola oleh pemerintah pusat. GAM mulai mengendurkan tawaran untuk memperjuangkan satu tujuan. Setidaknya ada setitik sinar perdamaian disana.

Keberadaan partai politik lokal di Aceh merupakan hasil kompromi politik antara pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam rangka menghasilkan perdamaian di Aceh.

Dalam penandatanganan *MoU (Memorandum Of Understanding)* 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM di Helsinki, Finlandia, terdapat beberapa butir kesepakatan yaitu pemberian amnesty kepada anggota GAM berikut pemulihan hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Salah satu bentuk pemulihan hak politik yang begitu ramai dibicarakan adalah keinginan GAM membentuk partai politik lokal di Aceh.

Penandatanganan Nota kesepakatan ini merupakan harapan baru bagi demokratisasi politik dan perdamaian di Aceh. Penerapan MoU Helsinki telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Menurut Rauf (dalam Ali Safa'at,2011:259), “keberadaan partai lokal diperkirakan akan mampu menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan daerah lebih baik. Partai politik lokal di Aceh di harapkan mampu menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat didaerah-daerah secara lebih tepat mengingat beragamnya kepentingan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia”.

Partai politik lokal dianggap lebih mampu untuk memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat Aceh. Bisa saja ada partai politik yang hanya ingin menjadi partai politik lokal saja karena hanya seperti itu kemampuannya. Partai politik lokal tersebut lebih tertarik pada masalah politik ditingkat lokal sehingga hanya berminat mengajukan calon dalam pemilu ditingkat lokal (bahkan mungkin hanya disatu provinsi) konsep partai politik lokal akan dapat menampung aspirasi seperti itu.

Partai politik lokal di Aceh mempunyai tujuan dan fungsi yang hampir sama dengan partai politik nasional pada umumnya. Tujuan umum (mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 , mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh) dan tujuan khusus (meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh).

Sementara fungsi partai politik lokal di Aceh ada empat yaitu, pertama memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, kedua penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, ketiga penyerapan, penghimpunan dan penyaluran aspirasi politik rakyat dan keempat partisipasi politik rakyat (terdapat dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh pasal 79).

Perkembangan partai politik lokal di Aceh mengalami pasang surut, hal ini bisa dilihat dari jumlah partai politik lokal saat ini yang ada di Aceh yang hanya berjumlah tiga partai saja yaitu Partai Aceh (PA), Partai Damai Aceh (PDA) dan Partai Nasional Aceh (PNA). Sementara pada pemilu tahun 2009 yang lalu, ada enam partai politik lokal di Aceh yaitu : Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA) dan Partai Bersatu Aceh (PBA).

Jumlah ini akan terus mengalami penurunan dan penyusutan sebagai akibat dari undang-undang pemilu serta belum terlaksananya fungsi partai politik secara baik. Partai politik yang semulanya di harapkan dapat melakukan sosialisasi politik, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, sebagai sarana mempersiapkan kader, sebagai media menghimpun dan menyalurkan kepentingan masyarakat, partisipasi politik, sebagai peredam konflik, dan melakukan komunikasi politik atas dasar kepentingan rakyat dan penguasa. Namun, pada kenyataannya fungsi partai politik tersebut tidak berjalan dengan baik. Partai politik belum menunjukkan *performance* yang memuaskan bahkan semakin hari makin memperlihatkan gejala elitisme dalam pembuatan kebijakan dengan

mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan daripada kepentingan masyarakat dan bangsa. Keberadaan partai politik lokal juga saat ini masih merupakan suatu institusi yang memiliki potensi menjadi alat konflik masyarakat daripada sebagai peredam konflik, hal ini terlihat dari adanya pertikaian dan perpecahan antar partai politik lokal.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan fungsi partai politik lokal tidak berjalan dengan baik, keberadaan partai politik lokal belum mampu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, malah menjadi sebaliknya dimana partai politik cenderung sibuk memperebutkan kekuasaan, jabatan, dan uang. Sementara persoalan yang membelit rakyat dibiarkan begitu saja, seperti ketidakadilan, kemiskinan, ketidakamanan serta ancaman rasa takut akan konflik horizontal maupun vertikal. Padahal ketika pendirian partai politik atau kampanye pemilu selalu yang dijanjikan akan membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat, akan tetapi semuanya adalah hanya janji semata.

Saat ini muncul kesadaran di kalangan masyarakat bahwa mereka selama ini hanya dijadikan obyek oleh partai-partai politik lokal dengan janji-janji manis. Namun setelah berkuasa, janji itu kemudian dilupakan. Bahkan ada yang berpendapat, semua partai politik lokal itu sama, tidak ada bedanya antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka hanya memperlak rakyat dengan mencari dukungan untuk berkuasa. Setelah berkuasa lalu rakyat dilupakan dan ditinggalkan. Sehingga muncul pandangan bahwa partai politik lokal hanya merupakan simbol atau atribut demokrasi yang hanya untuk dipandang saja, bukan untuk dirasakan atau dinikmati keberadaannya melalui pelaksanaan

fungsinya. Dampak posisi partai politik lokal yang seperti ini akan berpengaruh terhadap keberadaan partai politik lokal sebagai lembaga demokrasi telah tersingkirkan dari kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti dan membahasnya lebih jauh dan rinci lagi dengan mengangkatnya dalam sebuah laporan penelitian dengan judul “ **Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Partai Politik Lokal di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi Masalah sebagai berikut :

1. Perkembangan partai politik lokal di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan partai politik lokal di Aceh.
3. Persepsi masyarakat tentang pelaksanaan tujuan partai politik lokal di Aceh.
4. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi partai politik lokal di Aceh.

C. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian, diperlukan adanya pembatasan masalah, hal ini diperlukan agar penelitian dapat berjalan tepat pada sasarannya. Dengan demikian yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Perkembangan partai politik lokal di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi partai politik lokal di Aceh.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan partai politik lokal di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi partai politik lokal di Aceh ?

E. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian perlu diketahui maksud dan tujuan dari penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan partai politik lokal di Aceh khususnya di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi partai politik lokal di Aceh khususnya di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis :

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta cara berpikir penulis tentang perkembangan pelaksanaan fungsi partai politik lokal di Aceh.

2. Bagi pemerintah dan partai politik lokal :

Sebagai masukan kepada pemerintah dan partai politik lokal di Aceh tentang pentingnya pelaksanaan fungsi partai politik dengan baik.

3. Bagi tokoh masyarakat :

Sebagai masukan bagi tokoh masyarakat tentang peran partai politik lokal di Aceh dalam menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat.